

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD 2017

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONKUREN

a. Ringkasan Urusan Wajib

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib yang melaksanakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Program dan Kegiatan

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Kegiatan Pembangunan Jalan
- Perencanaan Pembangunan Jembatan
- Pembangunan Jembatan
- Pembangunan Jembatan (DAK)
- Pembangunan Jalan untuk dihibahkan

b. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

- Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- Perencanaan Turap/Talud/Bronjong

c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan untuk dihibahkan

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan

e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- Pemberdayaan Petani Pemakai Air
- Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)

f. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

- Peningkatan Kapasitas Daya Tampung Sumber Air Baku

g. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

h. Program Pengendalian Banjir

- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
- Perencanaan Pengendalian banjir

i. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Pengadaan Lahan Jalan Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander

j. Program Perencanaan Tata Ruang

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- Pengadaan Alat Survey

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

-

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural danFungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	JumlahCpns	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	3	-	3
		Gol. III	107	-	107
		Gol.II	47	-	47
		Gol. I	3	-	3
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	21	-	21
		S1/D. IV	72	-	72
		D. III	22	-	22
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	43	-	43
		SMP/ sederajat	2	-	2
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	5	-	5
		Eselon IV	14	-	14
		Fungsional:			

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah Cdns	Total
		Tertentu	8	-	8
		Umum	132	-	132
JUMLAH TOTAL			160	-	160

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWA (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.827.663.633	6.224.830.000	54.152.926.281	215.800.726.150	293.006.146.064	266.763.313.264	91,04	Dinas PUPR

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

(data dari Biro Pemerintahan)

7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana Dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

8. Permasalahan dan solusi

1. Permasalahan

- Belum terlaksana proses pembuatan akta hibah sehingga pada tahapan tersebut belum dilakukan proses pemisahan sertifikat oleh pihak BPN Kota Pangkalpinang.
- Proses konsinyasi di PN Sungailiat tidak berjalan optimal, sehingga proses penitipan uang ganti rugi dalam pengadaan tanah Jl. Lintas Timur Kab. Bangka tidak bisa terserap.
- Kurangnya Sumber daya Manusia yang berkompeten pada bagian Perencanaan, Penataan Ruang dan Tenaga Teknik.

2. Solusi

- Agar proses pembuatan akta hibah dalam segera dilakukan sehingga proses pemisahan sertifikat tanah bisa dapat dibuat.
- Menyampaikan ke Pihak yang bersengketa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga proses konsinyasi dapat berjalan

optimal, sehingga realisasi uang ganti rugi yang dititipkan pengadilan dapat terserap.

- Mengajukan permintaan Sumber Daya Manusia yang ahli dan berkompeten pada bagian perencanaan, penataan ruang dan tenaga teknik.

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1.1. Tugas Pembantuan Bina Marga

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor : DIPA – 033.04.4.309036/2017

b. Instansi Pemberi TP

Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

c. Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	13.286.172.000,-	13.242.295.000,-

d. OPD yang melaksanakan TP

OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

e. Pegawai

TP Bina Marga

NO	KRITERIA	RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I	- 9 4 -	- - - -	- 9 4 -
II	Berdasarkan Pendidikan	S3 S2 S1 D. IV D. III D. II D. I SMA / sederajat SMP / sederajat SD / sederajat	- 2 7 - - - - 3 - -	- - - - - - - - - -	- 2 7 - - - - 3 - -
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural - eselon II - eselon III - eselon IV Fungsional	- 1 1 -	- - - -	- 1 1 -

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana mencukupi.

g. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam hal pelaksanaan dan realisasi anggaran Tugas Pembantuan mencapai 99,67% dan fisiknya 100%.

1.2. Tugas Pembantuan Sumber Daya Air

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor : DIPA – 033.06.4.309214/2017

b. Instansi Pemberi TP

Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

c. Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Pengelolaan Sumber Daya Air	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	2.207.100.000,-	1.949.184.000,-

d. SKPD yang melaksanakan TP

SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

e. Pegawai

NO	KRITERIA	RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	1	-	1
		Gol. III	4	-	4
		Gol. II	4	-	4
		Gol. I	-	-	-
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	2	-	2
		S1	3	-	3
		D. IV	-	-	-
		D. III	-	-	-
		D. II	-	-	-
		D. I	-	-	-
		SMA / sederajat	4	-	4
		SMP / sederajat	-	-	-
SD / sederajat	-	-	-		
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural	-	-	-
		- eselon II	-	-	-
		- eselon III	1	-	1
		- eselon IV	2	-	2
	Fungsional	-	-	-1	

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana mencukupi.

g. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam hal pelaksanaan dan realisasi anggaran Tugas Pembantuan mencapai 88,31% dan fisiknya 97,38%.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Pekerjaan Umum
2. Urusan Penataan Ruang

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1.	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 8 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	75%	100 %	Lihat Program Nasional untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pengumpulan Data Kinerja 2. SOP ttg Penggunaan dan Pemakaian Peralatan Kendaraan dan Alat-alat Berat	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg Seksi Tata Ruang	Ada 2 SOP	Ada 1 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 1. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM 	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 0. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0 	0 %	0 %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 15 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 	88,24 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Pranata Komputer.	tidak ada	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah`. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 150 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak ----- personil 	<ul style="list-style-type: none"> - PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 10 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak ----- personi 			Sumber data mengacu kondisi perangkat daerah terakhir/update tahun 2017/ BKD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim , sebanyak 9 org. - Jabatan, sebanyak 15 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 org.	60 %	75 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/update d Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 15 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/update d Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA .	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 Program	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 Program	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPd tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program. 	100 %	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggaran	13	Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Alokasi belanja SKPD, sebesar Rp. 290.553.136.064 - Total Belanja APBD, sebesar ----- 	<ul style="list-style-type: none"> - Total Alokasi belanja SKPD, sebesar Rp. 2.453.010.000, - - Total Belanja APBD, sebesar ----- % %	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 195.620.157.599,99 	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.604.820.000 	73,99 %	67,28%	Sumber data

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				(realisasi)		- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.264.378.093.963,99	- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-2.385.219.300			dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 11.628.578.650 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 53.004.230.861	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 20.974.500 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 757.279.300	21,93 %	2,77%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 11.628.578.650 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 264.378.093.963,99	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 20.974.500 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.385.219.300	4,4 %	0,88%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ---- jenis, sbb: 1.Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada sebanyak -- 3 jenis : Neraca, LRA, CALK	Ada sebanyak -- 3 jenis : Neraca, LRA, CALK	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Inventaris Barang.	Apabila Ada, Inventaris Barang.	Ada	-	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.907.635.167.607,29.	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak ----- asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----- asset.	0 %	-	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di LPSE (website) 3. Mobil Keliling 4. 5.	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di LPSE (website) 3. 4. 5.	Jumlah sebanyak -- 3 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

LAMPIRAN I.3 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	URUSAN	No.	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
4	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	24	Jalan provinsi dalam kondisi Mantap	$\frac{791,42}{850,99} \times 100 \%$	93 %	Sumber data dari Dinas PU & Penataan Ruang
		25	Rumah tangga persanitasi	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		26	Kawasan kumuh	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		27	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	$\frac{54,37 + 32,38 + 17,81 + 45,16 + 31 + 31,38 + 10,64}{7} \times 100 \%$	31,82%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota